



PENGUASAAN TANAH NEGARA, SELURUHNYA MILIKI ATURAN

AD



**PENCALOAN DALAM PENGURUSAN
KTP HARUS DIHAPUS**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

PENGUASAAN TANAH NEGARA, SELURUHNYA MILIKI ATURAN

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah negara

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, persoalan penguasaan tanah negara tersebut merupakan isu lama dan baru muncul saat ini.

"Permasalahannya, baik itu masalah tanah dengan masyarakat maupun masyarakat bersama perusahaan," ungkapnya.

Dia menilai, untuk mengurai permasalahan penguasaan tanah negara tersebut cukup rumit. Sebab semua penguasaan tanah memiliki aturan.

"Bahkan dari beberapa tempat lainnya, sebagian punya tanah dan yang lainnya punya

tempat," jelasnya.

Karena disebutkan memang ada beberapa indikasi surat tanah hanya asal dibuat tanpa melihat isi maksud tujuan.

"Sehingga permasalahan-permasalahan harus segera diurai, dan diselesaikan," ujarnya.

Alhasil pihaknya meminta perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta harus mulai dari bawah. "Mulai dari tingkat kepala kampungnya dan dari pihak BPN-nya," terangnya.

Termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurutnya harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Yaitu mulai dari tingkat RT, kampung sampai ke BPN. Sebab beberapa yang kita tanya itu malah seolah-olah berjalan sendiri. Kita ingin ada kolaborasi supaya masalah tanah bisa clear," tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

PEMBANGUNAN DEPO ARSIP BARU, DISPUSIP HARUS FOLLOW UP KE BUPATI

TANJUNG REDEB - Adanya rencana pembangunan depo kearsipan dokumen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada 2024 mendatang direspons positif jajaran legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mengungkapkan, kondisi Kantor Arsip dan Dokumentasi saat ini tidak memungkinkan menyimpan banyaknya berkas yang kian membludak.

"Menurut saya tidak masalah tambah depo arsip baru. Yang penting mereka segera menganggarkan ke Bapelitbang," ungkapnya.

Dia mengaku sangat mendukung pengadaan depo arsip Dispusip Berau. "Apalagi anggaran APBD kita tahun depan sangat besar yaitu mencapai Rp 5 triliun. Sehingga menurut saya tidak masalah itu," ujarnya.

Politikus Hanura itu mengimbau agar Kadispusip Yudha Budisantoso untuk terus mem-follow up Bupati Berau,

Sri Juniarsih.

"Jangan ke PUPR, karena mereka pelaksana saja. Nanti yang merencanakan Bapelitbang dan Dispusip harus langsung minta arahan dari Bupati," bebernya.

Pasalnya jika Bapelitbang dan Bupati Berau menyetujui pengadaan gedung depo arsip baru tersebut dapat dipastikan kebutuhan tempat berkas setiap opd terkait bisa terpenuhi.

"Kalau Bupati menyetujui lalu Bapelitbang yang merencanakan sepakat maka dapat dipastikan kebutuhan depo bisa terpenuhi," imbuhnya.

Sebab kata dia peran DPRD yaitu persoalan tambah gedung depo arsip baru sangat setuju.

"Karena kami di sini hanya berperan menyetujui anggaran dengan tepat guna, ke depannya bisa berfungsi maksimal depo baru tersebut," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

PENCALOAN DALAM PENGURUSAN KTP HARUS DIHAPUS

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyoroti maraknya pencaloan dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutinya, harus ada pengawasan berkala dalam persoalan tersebut.

Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan terus menerus. Pasalnya, pengurusan KTP berkaitan dengan pelayanan publik.

"Pencaloan harus dihapuskan, agar kepengurusan berkas masyarakat bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada," ungkapnya.

Dirinya menilai, pencaloan sangat sulit untuk dilepaskan, karena masyarakat ingin seluruh urusan mengenai berkasnya selesai dalam waktu yang singkat.

"Tetapi agar tidak semakin marak, pihak OPD terkait harus selektif. Jika sifatnya calo, sebaiknya tidak dilayani. Namun, jika ingin membantu orang, tidak masalah," katanya.

Namun, dengan sistem online yang telah dikeluarkan Disdukcapil Berau, lanjut Nurung, segala pengurusan akan lebih mudah.

"Tapi untuk sistem online ini, cara penggunaannya harus terus disosialisasikan, terutama untuk warga di kampung-kampung. Karena kalau warga yang dari kampung biasanya kurang mengerti sistem online," ujarnya.

Selain itu, Politikus NasDem ini juga mengimbau agar Disdukcapil memprioritaskan masyarakat yang sangat memerlukan tanda kependudukan, khususnya bagi mereka yang jauh dari pusat ibukota Tanjung Redeb.

"Masyarakat jangan dipersulit, karena selaku warga negara dan berdomisili di tempat itu, maka berhak untuk mendapatkan identitas. Jadi saya berharap pelayanan Disdukcapil ke depannya bisa lebih baik lagi dan jauh dari calo," tutupnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

PERHATIKAN KUALITAS IKAN UNTUK PENCEGAHAN DINI STUNTING

TANJUNG REDEB - Kualitas ikan hasil tangkapan dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan hal tersebut.

Dia menerangkan, kualitas ikan hasil tangkapan perlu diperhatikan karena sebagai bentuk tindak lanjut gebrakan pemerintah pusat ke tingkat kabupaten/kota agar mengadakan kampanye gemar makan ikan sebagai upaya pencegahan dini stunting.

"Kami meminta dinas perikanan juga memperhatikan kualitas bahan baku ikan segar dari tangkapan nelayan," ucapnya.

Dirinya membeberkan, rerata hasil ikan laut segar dari daerah pesisir selatan Kabupaten Berau dijual ke luar kota. "Rata-rata 70 persen ikan segar dari Berau dijual ke Bontang, Sangata, Samarinda dan Balikpapan," ungkapnya.

Politikus Golkar ini menilai, ikan laut segar banyak dijual ke luar kota karena harga pasaran yang lebih terjangkau. "Bisa juga karena harga jual di sana lebih baik, info ini saya dapat langsung dari

nelayan," katanya.

Agar ke depan ikan laut segar tidak lagi diperjualbelikan ke luar kota, Subroto meminta OPD terkait melakukan survei pasar.

"Tujuannya adalah agar seluruh harga ikan yang dijual sama, meski tidak tinggi, tetapi harganya sama dengan luar daerah," imbuhnya.

Dengan demikian, kebutuhan ikan segar di Kabupaten Berau bisa selalu terpenuhi untuk konsumsi anak-anak maupun masyarakat umum.

"Dan jangan sampai program kita tidak satu arah. Satu arah maksudnya pemerintah menggebu-gebu ajak anak sekolah gemar makan ikan, tetapi kenyataannya hasil nelayan ini tidak bisa di backup dari pemerintah," tuturnya.

Dirinya sangat menyayangkan ikan dengan kualitas terbaik bisa saja ke depan bakalan laku terjual di luar kota.

"Contoh ikan putih, ikan merah yang bisa dikatakan lari keluar kota. Kita dikatakan cuma bisa mendapatkan mutunya kurang. Jadi ini harus ada sinergi antara Pemkab dan Dinas Perikanan," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

MARAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN, DORONG PENGAWASAN OPD TERKAIT

TANJUNG REDEB - Beberapa bulan terakhir, pembangunan perumahan di Berau tampak menjamur. Sehingga, kegiatan bisnis properti yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia menegaskan, pebisnis properti harus memperhatikan izin mendirikan bangunan, atau yang saat ini dikenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Saya imbau untuk memperhatikan izin mendirikan bangunan rumah karena itu ada undang-undangnya," ungkapnya.

Dirinya mendorong pihak developer properti memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pembangunan rumah.

Namun, Elita meyakini developer lahan atau pengembangan properti bangunan rumah sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

"Itu harapan kami. Kita juga berharap dari pemerintah daerah dan OPD terkait juga melakukan pengawasan dengan adanya pembangunan perumahan," ucapnya.

Tujuan pengawasan tersebut, lanjutnya, agar tidak menciptakan kondisi pemukiman yang kumuh.

"Sehingga kami berharap para developer properti untuk saling bersinergi mewujudkan penataan ruang perumahan yang rapi serta bebas banjir," ujarnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini menilai, inovasi Pemkab Berau pada saat ini mengenai adanya bisnis properti menjadi ladang pemenuhan tenaga kerja lokal di Bumi Batiwakkal.

"Kita juga tidak bisa menghalang inovasi kinerja Pemkab Berau yang sedang berlangsung, karena itu juga berdampak multiplier efek untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal," pungkasnya. (adv/set)



TUNJANG KINERJA TRANTIBUM JELANG IKN, PERSONE; SATPOL PP PERLU DITAMBAH



**KOMISI I DPRD PPU APRESIASI
SUKSESNYA PILKADES
SERENTAK 2023**



Personel Satpol PP PPU saat melakukan pengamanan di kawasan Pelabuhan Penajam. (Humas Satpol PP PPU for MediaKaltimGroup)

TUNJANG KINERJA TRANTIBUM JELANG IKN, PERSONE; SATPOL PP PERLU DITAMBAH

PPU - Untuk menunjang peningkatan kerja ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) daerah, perlu adanya penambahan personel Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU). Sejalan dengan potensi pertambahan penduduk jelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini, jumlah personel Satpol PP PPU yang ada berjumlah 248 orang. Terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 209 orang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 39 orang.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP PPU, Denny Handayansyah menyebutkan kondisi wilayah di PPU memungkinkan banyak terjadi kerawanan sosial. Terlebih kehadiran IKN di Sepaku, yang akan berbatasan langsung dengan wilayah PPU.

"Pertimbangannya karena wilayah Penajam Paser Utara ini luas, ditambah ada lagi IKN," ungkapnya baru-baru ini.

Terbaru ini saja, Satpol PP sudah mengamankan empat orang PSK yang datang

dari luar daerah. Karena menganggap PPU semakin ramai, setelah IKN berada di Kaltim.

Kondisi tersebut dikhawatirkan terus terjadi, hingga pasca pemindahan pusat negara itu terjadi. Sehingga harus dimitigasi dengan menambah personel yang akan bertugas nantinya.

"Satpol PP jelas dibutuhkan sebagai penegak perkara. Di mana Satpol PP sebagai pioner menjaga trantibummas, yakni penegakan perda dan perbup" terangnya.

Selain itu, tidak hanya penambahan jumlah personel, kejelasan status ratusan THL Satpol PP juga dinantikan. Setidaknya, pada pengadaan PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatang, pemerintah daerah bisa memberikan formasi untuk Satpol PP.

"Satpol PP ini ada 209 THL yang menantikan kepastian status baik itu PNS, PPPK, atau yang terbaru ini PNS part time," tutup Denny. (ADV/SBK)



Kepala Satpol PP PPU Margono Hadi Sutanto saat ditemui di ruangannya. (Robbi/MediaKaltimGroup)

SEIRING PEMBANGUNAN IKN, SATPOL PP PPU TERUS IDENTIFIKASI IZIN BANGUNAN DI SEPAKU

PPU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara (PPU) terus melakukan identifikasi kelengkapan administrasi bangunan yang berdiri di kawasan KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai dukungan terhadap menjaga kondusifitas serta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam proses pemindahan ibu kota negara yang baru.

Seperti diketahui, fokus pembangunan infrastruktur pendukung IKN berada di sebagian wilayah di daerah berjudul Benuo Taka itu, yakni di Kecamatan Sepaku. Patut diketahui pula, hingga kini wilayah kawasan tersebut masih masuk dalam kewenangan administrasi PPU.

"Kami menelusuri kelengkapan administrasi bangunan yang berdiri di IKN," kata Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Susanto baru-baru ini.

Kegiatan identifikasi bangunan di wilayah itu sudah dilaksanakan semenjak awal tahun ini. Selama ini, telah ada sejumlah bangunan yang berdiri di kawasan tersebut tidak memiliki kelengkapan perizinan.

Di antaranya tempat produksi beton curah

siap pakai (batching plant). "Beberapa sudah Kami tindak, dengan melakukan teguran dan penertiban," sebutnya.

Sesuai aturan, apabila bangunan yang berdiri tanpa memiliki kelengkapan perizinan tersebut ada sebelum kewenangan Otorita IKN, maka Satpol PP PPU bakal melakukan penindakan. Pun dalam koordinasi aksi itu, pihaknya bekerjasama dengan Bagian Hukum Otorita IKN.

Menurut Margono, sebelum ada kewenangan Otorita IKN yang berkewajiban melakukan penindakan terhadap bangunan liar atau tanpa izin di kawasan IKN ialah Pemkab PPU. Sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yaitu sebelum Peraturan Presiden (Perpres) pemindahan IKN terbit kewenangan di Kecamatan Sepaku masih Satpol PP PPU, termasuk ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

"Bangunan-bangunan liar atau tidak berizin di Kecamatan Sepaku, terutama yang berdiri sebelum ibu kota negara Indonesia pindah tetap akan ditertibkan Satpol PP," tutup Margono. (ADV/SBK)



Apel personel Satpol PP PPU. (Robbi/MediaKaltimGroup)

SESUAI ATURAN, URUSAN TRANTIBUM DI SEPAKU MASIH KEWENANGAN SATPOL PP PPU

PPU - Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini masih menjadi kewenangan Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU). Oleh karena itu, segala peraturan yang dimiliki daerah, harus pula dipatuhi di wilayah tersebut.

Hal itu ditegaskan Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Sutanto, sesuai dengan surat Mendagri. Yang menyebutkan sampai Perpres pemindahan IKN terbit, maka kewenangan di Sepaku masih milik Satpol PP PPU termasuk trantibum.

"Makanya itu, bangunan-bangunan yang tidak berizin di Sepaku terutama yang sudah ada sebelum IKN pindah, ditertibkan oleh Satpol PP," ujarnya, Kamis (16/11/2023).

Sekadar informasi, ada beberapa bangunan yang didapati tidak memiliki perizinan lengkap, namun beroperasi di IKN. Bangunan

tersebut yakni batcing plan. Pun soal ini, lanjutnya, akan segera menelusuri administrasi bangunan tersebut.

"Apabila dibangun sebelum adanya kewenangan Otorita terkait perizinan, maka akan dilakukan penindakan," katanya.

Margono mengatakan bahwa sejauh ini kewenangan Otorita IKN, berkaitan dengan perizinan pembangunan baru. Sementara sebelum ada kewenangan Otorita IKN, maka yang berkewajiban melakukan penindakan adalah Pemkab PPU.

Dalam tiap aksi penindakan yang sudah, dan akan dilakukan itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Otorita IKN. Bentuk penindakan yang dilakukan yakni yustisi, dan tetap akan bekerjasama dengan Otorita IKN.

"Sudah ada beberapa penertiban. Ini masih tahap identifikasi lagi, terus dilakukan selama itu masih kewenangan Kita," pungkas Margono. (ADV/SBK)



Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto. (Robbi/MediaKaltimGroup)

KOMISI I DPRD PPU APRESIASI SUKSESNYA PILKADES SERENTAK 2023, CAKADES TIDAK TERPILIH DIMINTA UNTUK TETAP BERKONTRIBUSI PADA MASYARAKAT DESA

PPU - Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengapresiasi lancarnya penyelenggaraan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 14 desa di PPU. Kemudian mendorong para kades terpilih nantinya dapat menjabat sesuai dengan aturan dan mendukung kemajuan pembangunan daerah.

Pilkades Serentak PPU 2023 telah berlangsung sukses, Minggu, 29 Oktober 2023 lalu. Hasil pemilihan tersebut telah menentukan siapa yang akan memimpin masing-masing desa, tetapi ada juga calon kades (cakades) yang harus menerima kenyataan karena tidak terpilih.

"Kami ucapkan selamat ke pada kades terpilih dan percaya mereka akan membawa perubahan positif, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi I PPU, Irawan Heru Suryanto, Kamis (16/11/2023).

Diketahui pada pemilihan kepala desa serentak ini diikuti oleh 14 desa yang ada di Kabupaten PPU dinyatakan 11 diantaranya merupakan incumbent/petahanan. Namun semuanya dinyatakan tumbang atau gagal menjabat lagi sebagai kepala desa karena raih suara memilih.

Untuk itu, Irawan memberikan pesan khusus kepada cakades baik yang tidak terpilih dalam pesta demokrasi ini. Menurutnya, mungkin mereka dalam kontestasi politik sudah

harus siap untuk menerima hasil akhirnya.

"Jangan berkecil hati. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kami menghargai usaha keras dari semua calon kepala desa yang telah berpartisipasi dalam pemilihan ini. Pilkades adalah bagian dari demokrasi, dan keberhasilan atau kegagalan adalah hal yang biasa dalam kontestasi politik," jelasnya.

Ia menambahkan, kegagalan dalam pemilihan tidak boleh menjadi akhir dari perjalanan politik cakades. Sebaliknya, kesuksesan dalam kepemimpinan desa dapat dicapai dengan berbagai cara, bukan hanya melalui pemilihan.

"Cakades yang tidak terpilih masih memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat desanya," sambung Irawan.

Selain itu, pentingnya berpikir jauh ke depan dan terus bekerja untuk kesejahteraan desa tanpa harus terpaku pada hasil pemilihan. Tentunya dorongan ini diberikan untuk memotivasi cakades yang tidak terpilih untuk tetap berjuang dan berkontribusi pada masyarakat desa.

"Kita semua ingin yang terbaik untuk Kabupaten PPU, dan itu bukan hanya tanggung jawab cakades terpilih, tetapi juga seluruh elemen yang ada di desa," pungkasnya. (ADV/SBK)



3.372 PESERTA IKUT TES SKD PPPK 2023 UNTUK FORMASI GURU DAN NAKES



**Sekcab Kukar Buka
Sosialisasikan Pelaporan Kinerja
Pegawai Secara Digital**



Suasana tes SKD PPPK 2023. (Istimewa)

3.372 PESERTA IKUT TES SKD PPPK 2023 UNTUK FORMASI GURU DAN NAKES

TENGGARONG- Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di SMPN 1 Tenggarong. Diikuti ribuan peserta yang mengadu peruntungan dalam lima hari, sejak tanggal 13-18 November 2023.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rahmadi, mengatakan tes ini membuka lapangan pekerjaan dengan formasi 1.500 orang Guru dan 1.499 Tenaga Kesehatan (Nakes).

Pelaksanaan tes dilakukan se-

suai dengan keputusan Menteri PAN-RB Nomor 546 Tahun 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sejauh ini berjalan dengan lancar.

"Total pelamar tenaga guru ada 1.526 orang," terang Rahmadi, Kamis (16/11/2023).

Dari total keseluruhan pelamar 1.401 orang dinyatakan memenuhi syarat, terdiri dari tenaga guru prioritas (P1) berjumlah 307 orang, non ASN sebanyak 991 orang, dan 228 pelamar umum.

Lebih lanjut Rahmadi juga mengatakan, pelamar tenaga kesehatan berjumlah 1.846 orang, dengan kategori pelamar

umum sebanyak 424 orang dan non ASN sebanyak 1.422 orang.

Adapun, pelamar yang memenuhi syarat untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 1.579 orang. Sehingga, total peserta test SKD PPPK yang digelar Pemkab Kukar sebanyak 2.980 orang.

"Total pelamar mencapai 3.372 orang, yang tidak lolos seleksi administrasi 392 orang," tambahnya.

Terakhir, Rahmadi menyampaikan, hasil tes SKD PPPK bisa diakses melalui akun Instagram BKPSDM Kukar, pengumuman akan dimulai dari nilai peserta tertinggi.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Suasana sosialisasi pelaporan kinerja pegawai pada aplikasi SIASN dan e-Kinerja. (Istimewa)

Sekcab Kukar Buka Sosialisasikan Pelaporan Kinerja Pegawai Secara Digital

TENGGERAONG - Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, membuka sosialisai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (16/11/23).

Sosialisasi ini dilakukan, untuk memberikan pemahaman pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pelaporan kinerja pegawai. Dengan harapan dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi pegawai.

Sesuai dengan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yakni dengan memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Kukar, untuk meningkatkan kualitas ASN di Kukar.

"Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa," kata Sunggono dalam sambutannya.

Dalam hal ini, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai

ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Sayangnya, berdasarkan hasil penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), terhadap Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) di Kukar, yang dilakukan antara bulan Januari-Oktober 2023 masih tidak sesuai harapan.

Sunggono mengatakan, terdapat empat indikator yang dapat meningkatkan nilai IP-ASN. Salah satunya adalah Nilai kualifikasi Kinerja, yang bisa diukur dari tingkat Kesadaran ASN untuk membuat dan mengumpulkan laporan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Oleh sebab itu, ia menegaskan agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan data pengisian laporan SKP ASN dimasing-masing perangkat daerah.

"Saya tegaskan kepada seluruh kepala OPD untuk mengakomodir seluruh ASN yang ada dibawah pengawasannya," ujar Sunggono.

"Untuk dapat meningkatkan peran ASN dalam meningkatkan kinerja individunya dalam mendukung kinerja OPD. Salah satunya dengan membuat SKP," tegasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



KOMISI III MINTA PEMKOT PERHATIKAN RUMAH KUMUH DI KAWASAN LEMBAH

BACA HALAMAN A2



MASALAH FASUM DAN FASOS DI GRIYA WISATA TEMUKAN TITIK TERANG



Kunjungan komisi III terkait longsor di Lembah, Bontang. (Dwi).

Komisi III Minta Pemkot Perhatikan Rumah Kumuh di Kawasan Lembah

BONTANG - Rombongan Anggota Komisi III DPRD Bontang meninjau lokasi longsor di daerah Lembah, RT 53, Berebas Tengah, Selasa (14/11/2023) kemarin.

Saat peninjauan berlangsung, terdapat salah satu rumah warga yang menjadi perhatian anggota komisi III di dekat daerah longsor tersebut. Rumah warga itu terkategori sangat tidak layak.

Ketua Komisi III, Amir Tosina menegaskan, agar Pemkot segera bertindak supaya tidak ada kejadian atau hal yang sangat tidak diinginkan.

Sidak kali ini juga menghadirkan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Badan Perencanaan, Pe-

nelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang).

"Lahan yang longsor tersebut digunakan warga yang kurang mampu untuk membangun rumah. Maka dari itu, semua dihadirkan bersama, untuk memberikan tindak lanjut sebagai solusi longsor ini," ungkapnya.

Untuk perencanaan tindak lanjut dan akan mengkoordinasikan dengan pihak Kelurahan Berebas Tengah. Maka dari itu, meminta pihak kelurahan bisa menganggarkan dana untuk rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan longsor tersebut.

"Karena mereka tidak mampu memberikan landasan pada rumah mereka

atau melakukan penurapan, jadi mereka asal membangun saja," ujarnya.

Terlihat celah-celah longsor di bagian rumah warga sekitar. Amir ingin hal ini diberikan perhatian baik dari pihak Pemerintah Bontang bersama DPRD Bontang. Dirinya berharap pemerintah dapat membantu warganya yang tergolong miskin untuk memenuhi kebutuhan papannya yang lebih baik.

"Nanti kami akan usulkan di Musrenbang selanjutnya, atau rapat-rapat khusus di DPRD bahwa warga Berebas Tengah butuh bantuan," tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam



Komisi III DPRD Bontang saat sidak di Perumahan Griya Bontang Kuala. (Dwi).

Masalah Fasum dan Fasos di Griya Wisata Temukan Titik Terang

BONTANG - Komisi III DPRD Kota Bontang kembali melakukan sidak di Perumahan Griya Wisata Bontang Kuala untuk yang kesekian kalinya, guna mencari solusi terkait fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang dikeluhkan warga, Selasa (14/11/2023).

Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosi-na menjelaskan, sidak kali ini sudah memiliki titik terang. Sebab, developer dengan iktikad baiknya mau menyerahkan ke Pemerintah Kota Bontang.

“Sidak untuk memperjelas segalanya dari pihak warga, developer, lurah, camat, Dinas Pertanahan, dan Dinas Perkim untuk lahan mana saja yang akan dihibahkan,” paparnya.

Selain itu, sertifikat lahan musala yang diberikan hanya sebagian sebelumnya, kini telah diberikan sepenuhnya, bahkan ada penambahan lima meter di bagian kanan kiri.

“Untuk selanjutnya, kami kembalikan ke lurah atau camat bersama warga dan developer untuk

menyelesaikan sendiri jika timbul permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.

Namun, Atos, sapaan akrabnya menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya penghibahan lahan tersebut.

“Kami berharapnya kedua belah pihak bisa terus sejalan dengan adanya hibah lahan ini, jadi tidak ada perselisihan lagi nantinya,” paparnya.

Selain itu, Atos berharap tidak ada lagi omongan buruk warga ke pihak DPRD Bontang yang mengatakan, bahwa pihaknya tidak bekerja, dikarenakan tidak bisa memberikan keputusan di mediasi dan sidak sebelumnya.

“Karena tugas kami hanya memberikan bantuan berupa mediasi, bukan pemberi keputusan. Karena permasalahan ini bersifat bisnis, jadi bukan ranah kami,” tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Tempat permainan anak di kantor pelayanan DPMPTSP Bontang. (Dwi).

Kantor DPMPTSP Bontang Sediakan Fasilitas Bermain Anak

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menyediakan fasilitas area bermain untuk anak-anak.

Santi Natalia Kanan, Sub Koordinator Bidang Ekonomi mengatakan, arahan tersedianya fasilitas bermain ini sesuai dengan undang-undang No 25 Tahun 2009, terkait tentang pelayanan publik. Ini menjadi alasan salah satunya yang telah menyediakan pelayanan untuk masyarakat.

"Tujuannya, kalau orang tua lagi mengurus surat perizinan dan kondisi sedang membawa anak, anaknya bisa menunggu sambil bermain dengan

permainan yang telah kami sediakan," paparnya saat diwawancarai, Rabu (15/11/2023).

Hal tersebut merupakan salah satu indikator penilaian, DPMPTSP telah menyediakan fasilitas tempat bermain anak di dalam kantor pelayanan. Ini merupakan salah satu persyaratan oleh pemerintah yang memang wajib disediakan.

"Kami berusaha menyediakan pelayanan yang terbaik, demi kenyamanan untuk seluruh masyarakat tentunya," ucapnya.

Pusat permainan yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kota Bontang seperti ayunan, perosotan, serta rumah-rumahan. (dwi/adv).



Kegiatan koordinasi dan sosialisasi perizinan berusaha bidang ketahanan pangan. (ist)

DPMPTSP Edukasi Perizinan Usaha di Bidang Ketahanan Pangan

BONTANG - Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pertemuan koordinasi dan sosialisasi perizinan berusaha bidang ketahanan pangan, Kamis (16/11/23).

Ketahanan pangan merupakan salah satu ilmu untuk para pelaku usaha, dalam menjalankan usaha di bidang kuliner. Oleh sebab itu agar para pengusaha memiliki legalitas mereka harus memiliki izin yang sah.

Jabatan Fungsional (Jabfung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan menjelaskan, dengan memiliki

izin berusaha, usaha mereka akan memiliki kekuatan hukum.

"Kita jelaskan semua keuntungan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), apa saja yang dibutuhkan dan lain-lain," jelasnya.

Kepengurusan NIB juga dinilai sangat mudah, praktis, dan tidak memakan banyak waktu. Bisa dengan datang langsung ke kantor DPMPTSP atau melalui Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

"Tata cara pendaftaran hak akses dan penerbitan NIB dan UMKU kita jelaskan semua," tutupnya. (sya/adv)



Pelayanan di MPP Bontang. (ist)

DPMPTSP Tetap Buka Pelayanan Sabtu di MPP

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang memanfaatkan waktu di akhir pekan, untuk tetap membuka pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan tetap buka di Hari Sabtu, lantaran ada sebagian masyarakat yang memiliki kesibukan di hari kerja. Adapun jenis perizinan yang dilayani antara lain untuk pendaftaran online, pelayanan informasi, konsultasi pelayanan Online Single Submission (OSS), pengambilan dan perpanjangan izin.

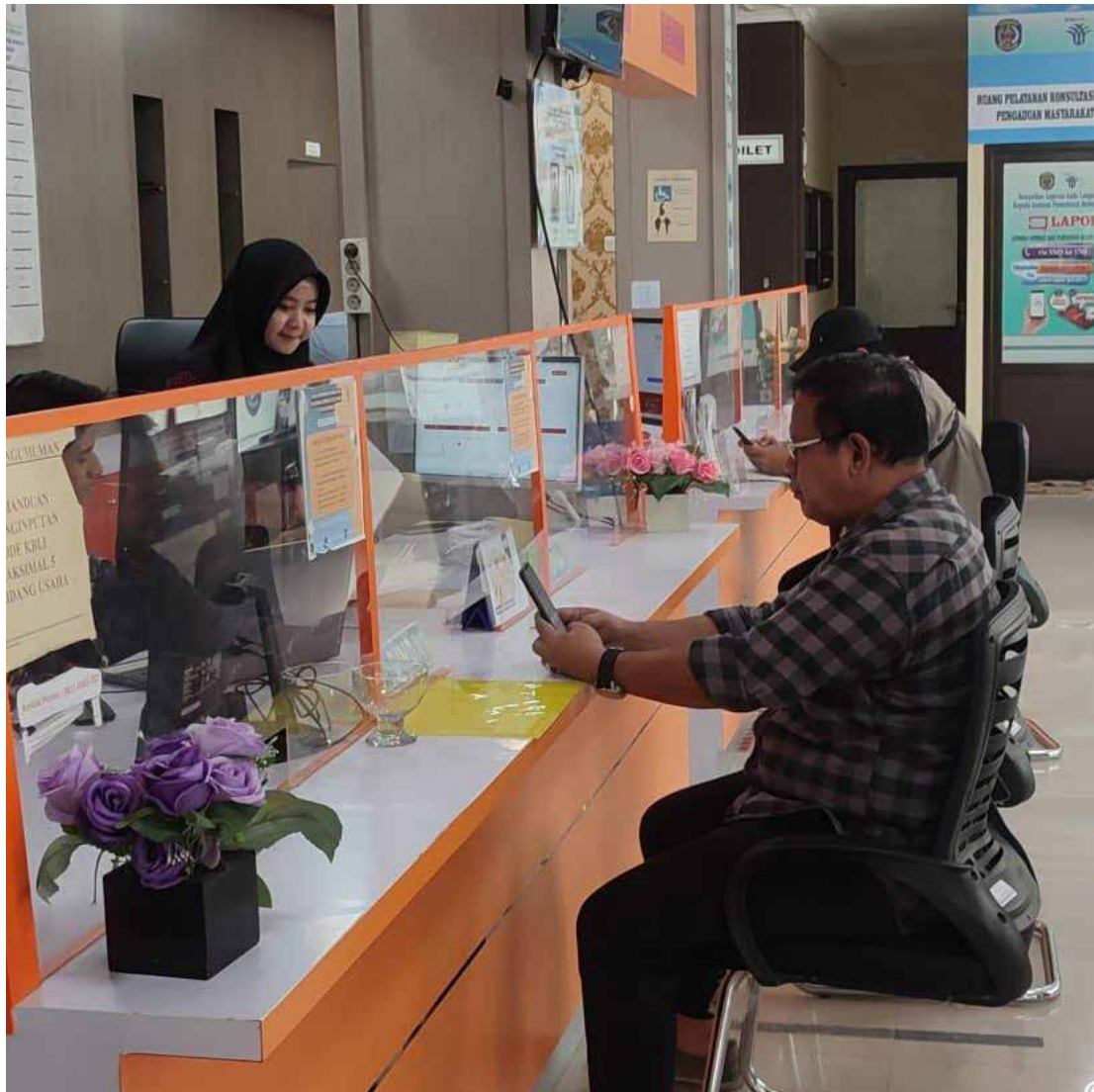
Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim mengatakan, DPMPTSP membuka pelayanan Hari

Sabtu di Mall Pelayanan Publik (MPP), yang berlokasi di lantai 4 Pasar Tamrin. Sudah dimulai sejak Oktober 2021 lalu, dan masih tetap aktif hingga kini.

"Pelayanan ini kita buka mulai dari pukul 08.00 hingga 11.30 wita," ungkapnya saat ditemui, Kamis (16/11/23).

Ia mengungkapkan, walaupun MPP sudah tidak seramai sebelumnya, tapi ia bertekad memberikan pelayanan terbaik dan tetap buka walaupun hari libur.

"Di hari Sabtu ada dua yang buka, Disnaker sama PTSP, karena kebetulan kita sering dicari warga untuk mengurus ini itu," tutupnya. (sya/adv)



Ilustrasi pelayanan. (Syakurah/Radarbontang)

DPMPTSP Buka Pelayanan di 7 Kelurahan

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menyiapkan Pojok Layanan (Pola PTSP) di kelurahan-kelurahan.

Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim mengatakan, dalam mengembangkan pelayanan pihaknya menyediakan konter pelayanan perizinan di 7 Kelurahan. Di antaranya Kelurahan Guntung, Loktuan, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Kanaan, Bontang Lestari, dan Gunung Telihan.

"Saat ini kami masih menyasar 7 kelurahan, sementara kalau kelurahan yang lain itu kan masih dekat dengan kantor DPMPTSP," katanya saat ditemu, Kamis (16/11/23).

Petugas pelayanan perizinan meminta bantuan pegawai kelurahan setempat, yang telah dibekali informasi terkait pengajuan permohonan perizinan, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Pelayanan di kelurahan paling kebanyakan NIB, karena mudah juga kan untuk berkasnya hanya perlu KTP dan nomor HP," jelasnya.

Adapun sarana dan prasarana Pola PTSP seperti komputer, printer, dan scanner disediakan oleh DPMPTSP. Karena keterbatasan dana, sementara hanya menyasar 7 kelurahan yang memang cukup jauh dari kantor DPMPTSP. (sya/adv)



Kegiatan penghijauan pekarangan dan ternak lebah. (ist)

Inovasi Kelurahan Satimpo, Penghijauan Pekarangan dan Ternak Lebah Kelulut

BONTANG - Kelurahan Satimpo terus berinovasi dan mengajak masyarakat di wilayahnya, untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan rumah masing-masing.

Pemanfaatan pekarangan kosong tersebut, untuk menanam bunga dan beternak lebah madu jenis lebah kelulut. Warga di Kelurahan Satimpo dinilai cukup aktif dalam program-program yang diinisiasikan.

"Sudah satu tahun berjalan, hampir seluruh RT di Satimpo telah memelihara lebah," jelas Lurah Satimpo, Maryono, Rabu (15/11/23).

Inovasi tersebut terus berkembang, guna meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat. Target utama ternak lebah ini adalah para pensiunan yang sudah tidak bekerja.

"Kadang mereka malah menawarkan lahan mereka untuk penanaman dan ternak lebah" ungkapnya.

Ia menceritakan, awal program ini berawal dari ide salah satu warganya pensiunan kepala sekolah di Vidatra, lulusan Biologi yang bereksperimen dengan mengawinkan lebah. Karena berhasil,

warga tersebut mengusulkan ke kelurahan.

Akhirnya mereka menggabungkan ke dalam Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya (Posyantek) Kelurahan Satimpo, dan berjalan dengan dana stimulan serta swadaya masyarakat satimpo.

Diketahui, hasil dari Kampung Madu ini telah menghasilkan produk madu dari setiap kelompok masyarakat di setiap RT. Dua bulan sekali warga akan memanen madu hasil budidayanya, dan akan dikemas kemudian diberikan kepada orang yang sudah memesan.

"Produk induknya itu Merk Abah, yang pertama kali mencetus budidaya lebah ini. Belum bisa dijual karena stok yang terbatas, jadi rata-rata sudah ada yang pesan," jelasnya.

Melalui inovasi ini ia berharap akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dan sebagai upaya penghijauan dari bunga-bunga yang ditanam untuk pakan lebah-lebah tersebut.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



KEJARI BALIKPAPAN MUSNAHKAN 253 BARANG BUKTI KASUS PIDANA



**PASTIKAN KANTOR KPU AMAN,
SATGASKAMSELTIBCARLANTAS
POLDA KALTIM RUTIN PATROLI**



Kejaksaan Negeri Balikpapan musnahkan barang bukti terkait dengan 253 kasus pidana dari Juni hingga Oktober 2023.

KEJARI BALIKPAPAN MUSNAHKAN 253 BARANG BUKTI KASUS PIDANA

BALIKPAPAN - Kejaksaan Negeri Balikpapan menggelar pemusnahan Barang Bukti (BB) dari 253 perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Pemusnahan dilaksanakan di halaman parkir kantor Kejaksaan yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Kamis (16/11/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Balikpapan, Selamat Riyanto mengatakan, pemusnahan BB ini bertujuan untuk menjamin bahwa BB yang berkaitan dengan tindak pidana tidak ada yang tersisa atau hilang akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami juga ingin memberitahu

masyarakat bahwa BB ini sudah kami musnahkan, jadi tidak perlu ada keraguan atau pertanyaan tentang nasib BB dari tindak pidana ini," ujarnya.

Lebih lanjut Selamat Riyanto menjelaskan, pemusnahan BB ini sesuai dengan putusan PN Balikpapan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah).

"Saya harap dengan pemusnahan BB ini, masyarakat bisa lebih sadar dan menjauhi tindak pidana, khususnya narkoba yang sangat merusak generasi bangsa," jelasnya.

Acara yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari instansi seperti Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM), Polresta Balikpapan, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), untuk BB berupa sabu dan pil dicampur dengan bahan kimia lainnya dan dihancurkan dengan menggunakan belender.

Sementara untuk BB lainnya, seperti kosmetik ilegal, obat herbal, HP dan timbangan mini, disatukan dalam sebuah drum dan dibakar. Sedangkan senjata tajam (Sajam) dipotong dengan mesin gerinda agar tidak bisa digunakan lagi.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Personel Satgas Kamseltibcarlantas Ditlantas Polda Kaltim saat melaksanakan patroli di Kantor KPU Kota Balikpapan.

PASTIKAN KANTOR KPU AMAN, SATGAS KAMSELTIBCARLANTAS POLDA KALTIM RUTIN PATROLI

BALIKPAPAN - Satuan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) Ditlantas Polda Kaltim melaksanakan patroli rutin ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kamis (16/11/23).

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

"Hasil dari patroli ini menunjukkan bahwa situasi Kantor KPU berada dalam keadaan aman, serta tidak ditemukan adanya kunjungan atau tamu eksternal yang mencurigakan selama kegiatan patroli berlangsung," ujarnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, bahwa upaya seperti ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan

Balikpapan secara khususnya.

"Satgas Kamseltibcar Ditlantas Polda Kaltim tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam konteks persiapan pelaksanaan pemilu," jelasnya.

Tidak hanya di wilayah Kota Balikpapan saja, di sejumlah Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim Tim Satgas Kamseltibcar Ditlantas Polda Kaltim turut melaksanakan patroli rutin ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) yang ada.

"Sepanjang pengamanan dan patroli dilaksanakan, Satgas tersebut melaksanakan ke seluruh Kantor KPU yang ada di Kaltim," tegasnya.

Seperti diketahui, Satgas Kamseltibcar Ditlantas Polda Kaltim akan selalu memantau perkembangan yang terjadi di Kantor KPU setiap Kabupaten/Kota di Kaltim. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 mendatang dalam keadaan aman dan lancar.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Warga Desa Gurimbang, Kabupaten Berau, Muhammad Sa'at dan Ardianto saat usai membuat laporan di Polda Kaltim.

WARGA DESA GURIMBANG LAPORKAN OKNUM PREMAN YANG DUDUKI LAHAN WARGA

BALIKPAPAN - Sejumlah warga dari kampung Desa Gurimbang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mendatangi Polda Kaltim untuk menyampaikan laporan perihal adanya dugaan praktik tambang ilegal di wilayahnya, pada Kamis (16/11/2023).

Perwakilan warga, Muhammad Sa'at mengatakan, adanya aktivitas tambang ilegal tersebut membuat kebun warga terkena imbasnya, yakni mengalami kerusakan. Di mana alat berat dari perusahaan tambang tersebut telah banyak mengupas lahan warga.

"Kami juga takut atas aksi premanisme yang dikirim untuk mengintimidasi warga," ujarnya.

Lebih lanjut Sa'at menjelaskan, warga yang mencoba melawan praktik pertambangan ilegal tersebut pun harus berhadapan dengan preman yang sengaja menduduki areal tersebut.

"Ada banyak preman digunakan untuk menduduki lahan warga hingga saat ini. Bahkan semakin banyak saja," jelasnya.

Ditambahkan warga lainnya, Ardianto bahwa preman yang menduduki lahan milik warga, bukan sebagai pemilik. Namun diduga hanya dibayar oleh salah seorang aktor, yang dananya diduga dari salah satu kontraktor perusahaan tambang.

"Bahkan saat dimintai keterangan pada saat itu, yang menduduki lahan, bahwa mereka hanya disuruh dan digaji Rp 250.000 dalam sehari perorang," tambahnya.

Untuk itulah sejumlah warga ini melaporkan ke Polda Kaltim. "Sebagai pemilik lahan, saat ini kami melaporkan salah seorang yang diduga sebagai aktor dilapangan dalam mengatur massa preman bayaran, yaitu yang berinisial FS. Kita telah melaporkan kepada aparat penegak hukum Polda Kaltim, karena warga pemilik lahan telah merasa prustasi dengan keadaan yang ada saat ini," tegas Ardianto.

Dengan adanya laporan warga ke Polda Kaltim, mereka berharap dapat segera diproses dan ditindak lanjuti, agar penegakan hukum dapat di tegakkan. Sebab telah beberapa kali dibuatkan laporan di Polres setempat, namun seakan ketidakberdayaan aparat penegak hukum.

"Sehingga warga pun memutuskan melaporkan perkara soal preman menduduki lahan milik warga, ke Polda Kalimantan Timur. Kami diterima langsung oleh penyidik di Ditreskrim Polda Kaltim dan berjanji akan meneruskan ke Bapak Kapolda Kaltim," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI JUMAT
17 NOV 2023



PORKAB PASER BERAKHIR, TANAH GROGOT SABET JUARA UMUM

**DPRD PASER MINTA BANKALTIMTARA
MASIFKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN CSR BAGI MASYARAKAT**





Penutupan Porkab ke 17 Paser

PORKAB PASER BERAKHIR, TANAH GROGOT SABET JUARA UMUM

PASER - Gelaran Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Paser ke 17 Paser resmi berakhir. Kontingen Kecamatan Tanah Grogot keluar sebagai juara umum dengan peroleh 94 medali. Rincian 42 emas, 28 perak dan 24 perunggu.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Arief Rahman mengatakan tujuan utamanya gelaran Porkab ini yakni sebagai seleksi atau persiapan atlet untuk event lebih besar lagi di tahun-tahun berikutnya.

"Terutama untuk penyelenggaraan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Kaltim 2026," kata Arief Rahman, usai penutupan Porkab ke 17 di Stadion Tapis, Kamis (16/11/2023).

Diketahui pada Porprov Kaltim 2026 nanti Kabupaten Paser bertindak selaku tuan rumah. Ia juga

meminta kepada atlet baik yang berhasil meraih prestasi maupun gagal di ajang Porkab untuk selalu semangat berlatih.

"Pokoknya berlatih dan berlatih terus, jangan patah semangat. Ke depannya atlet-atlet potensial ini diharapkan mampu mengharumkan nama Kabupaten Paser di ajang lebih tinggi lagi," tutur Arief.

Di tempat yang sama, Camat Tanah Grogot, Rasyid menuturkan berhasilnya meraih juara umum tak lepas dari semua peranan dari masing-masing cabor, baik pelatih, official, atlet hingga masyarakat yang sangat antusias menyaksikan setiap kontingennya bertanding.

"Mudah-mudahan dengan suksesnya gelaran ini menjadi motivasi untuk membangkitkan kembali olahraga di Kabupaten Paser," singkat Rasyid.

Untuk diketahui, di urutan

kedua diduduki Kecamatan Batu Sopang, lalu Long Kali, Paser Belengkong dan Kuaro secara berurutan. Sementara di urutan keenam ada Muara Samu, Long Ikis, Tanjung Harapan, Muara Komam dan terakhir Batu Engau.

Adapun total sebanyak 331 medali dengan rincian 97 emas, 97 perak dan 137 perunggu. Sementara yang terlibat mencapai 2.293 orang, di antaranya 1.868 orang atlet, 199 pelatih dan 226 official. Sementara ada 14 cabang olahraga (Cabor) dipertandingkan dalam porkab itu.

Cabor tersebut terdiri dari 13 cabang wajib seperti atletik, bola voli, bulu tangkis, dayung, pencak silat, sepakbola, tenis meja, basket, futsal, catur, pickleball, renang, karate, dan sepatu roda sebagai cabor ekshibisi.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Sekretaris Pansus 1 DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso

DPRD PASER MINTA BANKALTIMTARA MASIFKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN CSR BAGI MASYARAKAT

PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta Bankaltimtara agar turut berpartisipasi lebih dalam membantu pertumbuhan ekonomi daerah serta berkontribusi lewat tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso, saat rapat paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal kepada Bankaltimtara.

"Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini diharapkan Bankaltimtara dapat ikut membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan lebih aktif lagi," kata Edwin Santoso, di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Kamis (16/11/2023).

Hal itu ditujukan agar dapat meningkatkan rasio kredit usaha yang ada di Kabupaten Paser khususnya masyarakat di pedesaan dan para pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM). Tentunya upaya itu perlu dilakukan lewat pendekatan kepada masyarakat.

Selain itu terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), yang dinilai Edwin harus dilakukan secara tepat dan jelas peruntukannya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser.

"Selain itu diharapkan Bankaltimtara selalu ikut serta dalam setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser," tegas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser ini.

Bukan tanpa alasan, pasalnya DPRD Kabupaten Paser bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah menyetujui penambahan penyertaan modal kepada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Dijelaskan Edwin, pihaknya bersama Pansus 1 DPRD Kabupaten Paser telah melakukan kajian analisis investasi lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP), berkoor-

dinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Didjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dari hasil kajian analisis investasi, pihaknya menilai layak untuk merealisasikan pemenuhan penyertaan modal berdasarkan kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sampai dengan 2025.

"Adapun besarnya mencapai Rp 45 miliar dengan setoran modal tiap tahunnya Rp 15 miliar per tahunnya," pungkasnya.

Sementara itu, Pemimpin Bankaltimtara Cabang Paser, Yudhi Susatyo menyatakan, dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, Kabupaten Paser jadi urutan ke 6 sebagai daerah dengan penyertaan modal tertinggi se Provinsi Kaltim.

"Paser di urutan ke enam dengan estimasi Balikpapan tidak menambah penyertaan modal," ucapnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Rapat paripurna di Gedung Baling Seleloi

DPRD DAN PEMKAB PASER PROGRAMKAN 12 RAPERDA UNTUK 2024 MENDATANG

PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser sepakat untuk menggodok 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di 2014 mendatang.

Hal itu berdasarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Paser dalam penetapan program pembentukan Perda Kabupaten Paser 2024, melalui Rapat Paripurna di Gedung Baling Seleloi, Kamis (16/11/2023).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Paser, Indra Pardian menyatakan, ada 8 buah Raperda yang diusulkan Pemkab Paser, sementara inisiatif DPRD Kabupaten Paser sebanyak 4 buah Raperda.

Jumlah itu, dijelaskannya merupakan rancangan kumulatif menyesuaikan putusan Mahkamah Agung, APBD, serta penataan Kecamatan dan Desa.

"Ada 8 buah Raperda dari Pemkab dan dari kami ada 4 buah usulan. Ini akan dibahas di tahun depan," kata Indra.

Adapun Raperda usulan Pemkab Paser, yakni Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang

RPJPD 2025 - 2045, serta Raperda tentang Susunan Perangkat Daerah.

Sementara inisiatif, yakni Raperda tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Cagar Budaya, Raperda tentang Pengelolaan RTH, Pertamanan dan Pemakaman, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Itu semua berdasarkan hasil pembahasan juga dengan Bagian Hukum Pemkab Paser dan OPD Pengusul Kabupaten Paser, dimana pembahasan ini telah sesuai amanat pasal 34 UU Nomor 12 Tahun 2011," ucapnya Politisi PKB itu.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI JUMAT
17 NOV 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



SERU-SERUAN POUND COLOUR AND ZUMBA PARTY DI TAMAN BEBAYA SAMARINDA



**DPRD KALTIM DUKUNG PEMBANGUNAN
JALAN AKSES BARU DI SAMARINDA**

YUK, SERU-SERUAN POUND COLOUR AND ZUMBA PARTY DI TAMAN BEBAYA SAMARINDA

SAMARINDA - Bagi Anda yang suka berolahraga sambil bersewang-senang, jangan lewatkan acara Pound Colour and Zumba Party yang akan digelar pada Sabtu, 26 November 2023 di Taman Bebaya Samarinda.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Mahakam 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Pound Colour and Zumba Party adalah acara olahraga yang menggabungkan gerakan

pound dengan hiburan musik dan warna-warni bubuk. Pound sendiri adalah olahraga yang menggunakan tongkat seperti stik drum untuk mengikuti irama musik.

Juga akan ada Zumba Party, siapa yang tidak kenal dengan olahraga yang satu ini kan? Zumba adalah olahraga yang menirukan gerakan tari Latin. Peminatnya biasanya dari berbagai kalangan tua maupun muda. Kedua olahraga ini tentunya dapat membakar kalori, meningkatkan stamina, dan mengurangi stres.

Ditambah lagi ini akan perpaduan warna yang apik dan musik yang menarik yang bakal buat kamu semakin semangat. Satu lagi, kalian bakal dipandu sama Pound Pro Nanda, dan 3 Profesional Zumba Instruktur yakni Zin Herlina, Zin Idha dan Zin Arieska.

"Pound Colour ini yang pertama di Samarinda, bahkan di Kaltim. Kita adaptasi dari Colour Run sama sejumlah event yang gunakan bubuk holy sih, bedanya ini kita olahraga pound yang lagi hype sekarang ini. Zumba Party sendiri kita selenggarakan karena banyaknya minat olahraga ini di Kota Tepian," ucap Rizal Azhar selaku Steering Committee Pound Colour and Zumba Party 2023.

Acara ini akan dimulai pukul 06.00 Wita sampai selesai. Peserta yang ingin ikut harus mendaft-



ar terlebih dahulu melalui WhatsApp

0813-5444-0210 atau ke Loket yang tersedia di SUGUHAN Jalan Bhayangkara Samarinda. Biaya pendaftaran mulai dari Rp75.000 per orang.

"Pesertanya terbatas, hanya 150 orang. Dan yang sudah mendaftar, pada hari H kami harapkan menggunakan dress-code yang sesuai dengan tema acara, yaitu putih," beber Rizal.

Selain berolahraga, peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan doorprize dengan berbagai hadiah menarik, seperti voucher belanja, dan barang elektronik dan lainnya. Untuk itu,

peserta harus menyimpan nomor undian yang diberikan saat mendaftar. Pengumuman pemenang doorprize akan dilakukan setelah acara selesai.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan ajak teman-teman Anda untuk bergabung dalam Pound Colour and Zumba Party. Rasakan sensasi berolahraga sambil bersewang-senang di Taman Bebaya Samarinda. Acara ini dijamin akan membuat Anda lebih sehat, ceria, dan berwarna.(rls)

Instargram: @poundzumba-party

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

PRIA INI SIMPAN 16 POKET SABU DI TUTUP TANGKI SEPEDA MOTOR

SAMARINDA - Personel Polsek Samarinda Seberang berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114, 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba.

Penangkapan terjadi pada Senin (13/11/2023) sekira Pukul 14.00 Wita di Jalan HM.Rifaddin (dekat gerbang stadion palaran), Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Kapolsek Samarinda Sebetang Acp Bitab Riyani mengungkapkan, penangkapan ini berawal dari anggota SPKT yang melaksanakan patroli. Melihat seorang laki-laki yang mencurigakan memarkir sepeda motornya di TKP.

"Selanjutnya anggota SPKT melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 16 poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,07 gram bruto yang disimpan di tutup tangki minyak sepeda motor tersangka, yang mana barang narkoba tersebut diakui adalah miliknya," terang Kapolsek.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Seberang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yg berlaku.

Barang yang diamankan antara lain, 16 poket narkoba jenis sabu seberat 4,07 gram bruto, 2 buah HP android, 1 buah HP Nokia, 1 buah buku catatan penjualan narkoba, 1 unit sepeda motor Honda ADV warna pink. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari





Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane

LEGISLATOR PPP INI USULKAN LAHAN EKS PUSKIB JADI KAWASAN PENDIDIKAN TERPADU

BALIKPAPAN - Lahan bekas Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan (Puskib) yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Rencana pembangunan supermall dan apartemen di lahan tersebut melalui kerja sama bisnis Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) bersama pihak ketiga belum terealisasi meski peletakan batu pertama atau groundbreaking telah dilakukan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek pada tahun 2013.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane mengusulkan agar Pemprov Kaltim menghibahkan aset tersebut kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk dijadikan kawasan pendidikan terpadu. Menurutnya, pembangunan supermall tidak tepat karena akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat

sekitar, terutama beberapa rumah warga yang sempat terkena imbas saat pembongkaran bangunan Puskib.

"Kita minta itu bisa diserahkan ke Balikpapan untuk menjadi kawasan pendidikan terpadu. Lahan sangat luas dan strategis, apalagi di Balikpapan Tengah khususnya tidak punya SMA," kata Mimi akhir pekan lalu.

Mimi juga menyampaikan, kawasan sekitar eks lahan Puskib juga bisa dimanfaatkan membangun fasilitas lain, seperti kantor polsek dan koramil yang selama ini masih menumpang di kecamatan lain. Ia berharap, Pemprov Kaltim segera mengambil keputusan terkait pemanfaatan lahan Puskib itu.

"Tentu hal ini akan disampaikan kepada pemerintah provinsi, karena bagaimanapun pemanfaatan aset daerah untuk kemaslahatan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gu-

bernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi rencana kerja sama bisnis antara Perusda MBS dan pihak ketiga terkait pembangunan supermall dan apartemen di lahan Puskib. Ia mengaku, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.

"Kita lihat PT MBS secara verbal akan memutuskan. Setelah tahun lalu tidak jadi. Kita juga butuh kejelasan. Lanjut tidak, stop tidak, akhirnya hanya mangkrak begitu saja," kata Akmal saat meninjau langsung lokasi Puskib, Kamis (9/11/2023).

Lokasi bekas Puskib memang tidak ada pergerakan dan menjadi kawasan tak berpenghuni. Padahal, lahan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan dan Kaltim. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir

DPRD KALTIM DUKUNG PEMBANGUNAN JALAN AKSES BARU DI SAMARINDA

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, menyatakan dukungannya terhadap proyek pembangunan jalan akses baru dari Jalan Letjend S. Parman ke Jalan KH. Samanhudi yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Proyek tersebut bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di Jalan Gatot Subroto, Samarinda.

"Kami mengapresiasi proyek tersebut sebagai inisiatif Pemprov Kaltim untuk mengurai kemacetan di Samarinda yang penduduknya kian padat," ujar Sutomo.

Menurut Sutomo, proyek jalan akses baru tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Samarinda, terutama yang tinggal atau beraktivitas di kawasan

tersebut. Ia berharap proyek tersebut dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami meminta proyek tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya untuk membuahkan hasil yang optimal. Hal itu untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan pihak lain," katanya.

Sutomo juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proyek tersebut agar berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Ia juga berharap tidak ada kendala dalam proses pembangunannya, baik dari segi teknis maupun sosial.

"DPRD Kaltim akan mengawasi dan mendukung program pemerintah daerah. Kami juga

berharap tidak ada kendala dalam proses pembangunannya, baik dari segi teknis maupun sosial," tuturnya.

Selain itu, Sutomo juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas beberapa proyek pembangunan lainnya di Kaltim bersama Dinas PUPR provinsi. Ia meminta agar Dinas PUPR Kaltim mengoptimalkan program kerja pada tahun 2024 yang sudah direncanakan dan tetap menjaga mutu pembangunan.

"Jangan sampai proyek pembangunan dikerjakan tanpa kontrol standar kelayakan, yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat," pungkasnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

JAHIDIN : HARUS BAHU MEMBAHU TEKAN KERAWANAN PEMILU 2024

SAMARINDA - Pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Pemilu 2024 akan menentukan siapa yang akan memimpin bangsa dan daerah ini untuk lima tahun ke depan. Pemilu 2024 juga akan menjadi ajang untuk mengukur kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai politik yang berkompetisi.

Namun, Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, Pemilu 2024 juga berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat dan kelompok. Konflik dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti isu-isu yang berkaitan dengan SARA, hoaks, money politik, dan dinamika politik lokal. Konflik dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

"Untuk itu, kita semua harus bahu membahu menekan kerawanan Pemilu 2024 di tiap daerah, terutama di Kaltim," jelasnya kepada media ini.

Politisi PKB ini menyebut, semua elemen masyarakat Kaltim harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan suasana Pemilu 2024 yang damai, aman, dan demokratis. Elemen masyarakat meliputi pemerintah, legislatif, partai politik, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat luas.

"Masyarakat harus memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan daerah, bukan berdasarkan iming-iming uang, primordialisme, atau emosional. Dan juga harus menjaga persaudaraan dan kebersamaan sebagai warga negara Indonesia, serta menghormati pilihan dan hak suara masing-masing," ungkapnya.

Ia menerangkan, pemerintah dan legislatif harus bertanggung jawab untuk mengelola aset daerah dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Pemer-



intah dan legislatif juga harus memberikan contoh yang baik dalam berpolitik dan berdemokrasi, serta tidak melakukan intervensi atau tekanan terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu.

Sementara itu, partai politik sebutnya, harus mengedepankan visi, misi, dan program yang pro-rakyat dan pro-kepentingan daerah dalam kampanye Pemilu 2024. Partai politik juga harus menjunjung tinggi etika dan moral politik, serta tidak melakukan praktik money politics, politik identitas, dan politik adu domba yang dapat merusak kualitas demokrasi dan mengorbankan hak-hak rakyat.

Adapun Penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus bekerja secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. KPU harus menjamin hak pilih dan hak dipilih setiap warga negara, serta menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Sementara Pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus bekerja secara objektif, kritis, dan tegas dalam mengawasi Pemilu 2024. Bawaslu harus menegakkan aturan dan hukum yang berlaku, serta menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dapat merugikan peserta dan pemilih.

Jahidin juga menilai aparat keamanan, yaitu kepolisian dan TNI, harus bekerja secara netral, profesional, dan proporsional dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama

Pemilu 2024. Aparat keamanan harus melindungi hak-hak dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024, serta mencegah dan menangani segala bentuk gangguan dan konflik yang dapat mengancam stabilitas dan kondusifitas Pemilu 2024.

Tak luput, Jahidin menganggap media massa harus bekerja secara berimbang, akurat, dan bertanggung jawab dalam memberitakan Pemilu 2024. Media massa harus menjadi sumber informasi yang edukatif dan kredibel bagi masyarakat, serta menjadi sarana komunikasi yang konstruktif dan dialogis antara peserta dan pemilih.

Tak luput, menurutnya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi harus bekerja secara aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang Pemilu 2024 kepada masyarakat. Mereka juga harus menjadi perekat dan penyejuk bagi masyarakat yang terpolarisasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian.

"Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas politik di Kaltim, terutama menjelang Pemilu 2024. Mari kita bersama-sama menciptakan Pemilu 2024 yang damai, aman, dan demokratis di Kaltim. Mari kita bersama-sama membangun Kaltim yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," pungkasnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



LEGISLATOR INI USULKAN JALAN NEGARA DI KALTIM DIALIHKAN KE PROVINSI, TERKAIT PERCEPATAN PERBAIKAN

SAMARINDA - Untuk percepatan pembangunan dan perbaikan jalan yang berstatus jalan negara di Kalimantan Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin berharap statusnya diserahkan ke provinsi Kaltim.

Salehuddin mengatakan hingga saat ini perbaikan jalan negara yang menjadi jalan utama harus menunggu anggaran dari program pemerintah pusat. Padahal kondisi ruas jalan sudah banyak yang rusak dan berlubang.

Menurut Salehuddin Pasilitas, kondisi jalan yang bagus sangat penting sebagai penunjang ekonomi, mobilitas barang dan transportasi masyarakat, jika akses jalan rusak dan berlubang maka pastinya akan mengganggu kehidupan masyarakat.

"Tentunya kita prihatin ya, contohnya jalan dari Samarinda menuju Sendawar atau Kutai Barat, di beberapa titik masih banyak jalan yang rusak. Tentu ini mengganggu dan memperlambat perkembangan pembangunan," ujar Anggota DPRD asal Kukar ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Salehuddin berpendapat bahwa pemindahan pengelolaan jalan negara ke provinsi dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan memiliki kendali penuh atas pengelolaan jalan, pemerintah provinsi dapat lebih responsif dalam

melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak.

"Coba jalan itu diserahkan ke provinsi maka kita nggak harus menunggu pusat lagi. Bisa kita suarakan di provinsi penganggarnya, saya rasa perbaikannya akan lebih cepat karena memangkas jalur administrasi yang jauh ke pusat," jelasnya.

Selain itu, Salehuddin juga mengungkapkan harapannya bahwa dengan adanya pemindahan pengelolaan, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

"Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kalimantan Timur," imbuhnya.

Salehuddin berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan ini dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kondisi jalan di Kalimantan Timur.

"Saya meyakini bahwa dengan kerjasama yang baik, pembangunan jalan yang lebih baik dan kondisi jalan yang lebih baik dapat terwujud," tutup Salehuddin. (Adv/DPRD-kaltim/Han)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

**Deluxe Room**

ONLY

Rp ~~698.000,-~~**30% OFF****Rp488rb**

NETT/NIGHT

benefits**Breakfast**
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs**0811 581 3669**
www.hotelgrandkartika.com